

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Kepolisian Resort Kulon Progo dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kulon Progo dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Resort Kulon Progo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Kulon Progo

- a. Peranan secara *preventif* dilakukan oleh bagian Satbinmas, meliputi : 1) kegiatan patroli di wilayah yang diindikasikan sebagai tempat pencabulan anak yaitu obyek wisata seperti Pantai Congot, Pantai Glagah, Pantai Trisik, Pantai Bugel, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, dan di sekolah. Ketika patroli di sekolah tanggal 14 Februari 2014 Polisi Polres Kulon Progo merazia HP yang berisi gambar dan video porno di MAN 2 Wates; 2) kegiatan sosialisasi dilakukan 4 (empat) kali di lingkungan masyarakat (tanggal 24 Februari 2014, 1 April 2014, dan 12 April 2014) dan di sekolah (tanggal 24 Februari 2014, 11 April 2014); 3) kegiatan sambang di rumah- rumah warga.
- b. Peranan secara *represif*, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan pada orang dewasa dan anak yang patut diduga melakukan tindak pidana pencabulan anak.

1) Penyelidikan

Penyelidikan terhadap orang dewasa dan anak yang patut diduga melakukan tindak pidana pencabulan anak, meliputi :

- a) Menerima laporan dari korban (saksi I) dengan nama AUS yang berusia 16 tahun, yang patut diduga dilakukan oleh AAK bin Z (19 tahun). Di samping itu, juga menerima laporan dari korban (saksi I) bernama ER yang berusia 13 tahun 8 bulan, yang patut diduga dilakukan oleh TP bin S (14 tahun). Masing-masing dua laporan tersebut diperkuat oleh Saksi II yaitu ayah korban tindak pidana pencabulan anak.
- b) Mencari keterangan dan alat bukti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor (ayah korban) atau korban (AUS dan ER).
- c) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pencabulan anak untuk mencari informasi dan barang bukti
- d) Menyampaikan hasil laporan penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

2) Penyidikan

- a) Penyidikan terhadap tersangka AAK bin Z
 - (1) Pemanggilan terhadap saksi (AN, ES, S), ahli (dr. SU), dan tersangka AAK bin Z.
 - (2) Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka AAK bin Z.

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan sendiri-sendiri tanpa

sumpah. Pemeriksaan ahli dilakukan dengan cara memberikan keterangan langsung dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berbentuk tertulis. Pemeriksaan tersangka berjalan dengan baik karena tersangka kooperatif.

- (3) Penangkapan terhadap tersangka AAK bin Z dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Satreskrim Polres Kulon Progo dengan Nomor Polisi: SP. Kap/22/X/2012/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2012 di Persawahan dekat Pantai Trisik, Galur, Kulon Progo. Penangkapan tersebut dilakukan oleh 5 orang personil UPPA dan 1 orang Unit II (Tindak Pidana Tertentu).
- (4) Penahanan terhadap tersangka AAK bin Z dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Satreskrim Polres Kulon Progo dengan Nomor Polisi: SP. Han/124/X/2012/Reskrim tanggal 22 Oktober 2012. Penahanan tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Polres Kulon Progo guna pemeriksaan lebih lanjut. Karena tersangka melanggar Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (5) Penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 buah *HP* milik tersangka dan korban dilakukan, dapat disita tanpa izin dari Pengadilan Negeri Wates karena benda yang disita benda bergerak.
- (6) Pengambilan sidik jari dan memotret tersangka

Untuk kelengkapan dokumen UPPA Polres Kulon Progo mengambil sidik jari dan memotret tersangka dari berbagai posisi agar apabila tersangka melakukan tindak pidana lagi tersangka akan mudah dikenali.

(7) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam pemberkasan kasus dengan tersangka AAK bin Z, berkas perkara dikembalikan satu kali kepada Penyidik untuk disempurnakan hingga pada tanggal 30 Oktober 2012 berkas dinyatakan telah lengkap (P21). Setelah itu pada tahap kedua, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada JPU.

b) Penyidikan terhadap tersangka anak

- (1) Pemanggilan tersangka TP bin S, ahli (dr SU) dan 3 saksi (S, MR, dan NG).
- (2) Pemeriksaan tersangka, ahli, dan saksi
 - (a) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka TP bin S, Penyidik UPPA Polres Kulon Progo juga memanggil pihak terkait yaitu LPA untuk pendampingan tersangka dan Bapas untuk melakukan penelitian secara luas terhadap tersangka.

- (b) Pemeriksaan terhadap saksi dengan tersangka anak (TP bin S) sama dengan prosedurnya pada pemeriksaan dengan tersangka orang dewasa (AAK bin Z).
- (c) Pemeriksaan terhadap ahli dengan tersangka anak (TP bin S) sama dengan prosedurnya pada pemeriksaan dengan tersangka orang dewasa (AAK bin Z).
- (3) Tersangka TP bin S tidak dilakukan penangkapan dengan pertimbangan tersangka masih di bawah umur dan tersangka tidak akan melarikan ke luar Wilayah Kulon Progo. Namun tersangka TP bin S menjalani apel selama proses hukumnya berlanjut dan sampai memperoleh keputusan dari Pengadilan Negeri Wates.
- (4) Penyitaan
Tersangka TP bin S tidak dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa *HP* dikarenakan *simcard* milik tersangka telah dibuang oleh ibunya.
- (5) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Tujuan UPPA Polres Kulon Progo mengambil sidik jari dan memotret tersangka TP bin S dari berbagai sisi, seperti pada tersangka AAK bin Z.
- (6) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara pemeriksaan kepada JPU. Tahap kedua, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka TP bin S kepada JPU.

2) Hambatan yang dihadapi Polres Kulon Progo dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kulon Progo antara lain:

a) Hambatan Tindakan *Preventif*

(1) Internal

(a) Ketidaksiplinan pihak Kepolisian dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat yaitu tidak tepat waktu Polres Kulon Progo dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat

(b) Kegiatan sosialisasi berbenturan dengan kepentingan lain pihak Polres Kulon Progo karena kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat.

(2) Eksternal

(a) Sarana jalan yang kurang memadai untuk kegiatan patroli, sehingga Pihak Kepolisian kesulitan dalam mencapai lokasi untuk patroli.

(b) Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tentang waspada pencabulan anak. Terlihat diundang 40 orang, sedangkan yang hadir hanya 20 orang.

b) Hambatan Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* yang dilakukan oleh Penyidik UPPA Polres Kulon Progo, ditemukan hambatan yang bersifat internal, yaitu :

(1) Terkendala masalah biaya operasional. Keterbatasan anggaran transportasi yang dimiliki UPPA Polres Kulon Progo untuk melakukan pencarian tersangka yang berada di luar Wilayah Kulon Progo. Yang tersedia hanya Rp 200.000,00 padahal

biayanya lebih untuk menempuh jarak mencari keberadaan tersangka.

- (2) Kesulitan pihak UPPA Polres Kulon Progo untuk melacak keberadaan tersangka karena korban dan tersangka berkenalan melalui jejaring sosial, seperti *Facebook* atau *Twitter*. Selain itu, tersangka menggunakan alamat palsu sehingga cukup sulit dilacak keberadaannya.

- 3) Upaya yang dilakukan Polres Kulon Progo untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Wilayah Kulon Progo antara lain:

- a) Upaya Polisi dalam Mengatasi Hambatan Tindakan *Preventif*

- (1) Internal

- (a) Sanksi yang tegas oleh Kapolres Kulon Progo terhadap personil Polres Kulon Progo yang tidak disiplin dalam kegiatan sosialisasi, berupa skorsing kerja secara administrasi selama satu minggu tidak boleh melakukan kegiatan sosialisasi. Bertujuan agar personil Binmas Kulon Progo disiplin dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Sasaran Prioritas Tahun 2014 Polres Kulon Progo dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
- (b) Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi untuk menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi tentang pencegahan terjadinya pencabulan anak,

waspada pencabulan anak, pribadi yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, berhati-hatilah menjaga diri, dan tingkatkan ketaqwaan, hindari maksiat. Agar kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

(2) Eksternal

(a) Menggunakan jalan alternatif dalam kegiatan patroli. Pihak Satbinmas Polres Kulon Progo mencari jalan alternatif untuk sampai ke tempat tujuan, sehingga dapat dilaksanakan kegiatan patroli tersebut.

(b) Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Satbinmas Polres Kulon Progo melakukan pemberitahuan kepada masyarakat seminggu sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Selain itu, masyarakat diajak kerjasama dan dilibatkan dalam kepanitiaan kegiatan sosialisasi, agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan sosialisasi.

b) Upaya Polisi dalam Mengatasi Hambatan Tindakan *Represif*

Upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi hambatan internal dalam tindakan *represif* yaitu :

(1) Untuk mengatasi kesulitan biaya operasional pihak UPPA Polres Kulon Progo menggunakan uang pribadinya masing-masing untuk menambah biaya kekurangan yang hanya tersedia Rp 200.000,00.

- (2) Untuk mengatasi kesulitan mencari keberadaan tersangka, UPPA Polres Kulon Progo bekerjasama dengan dinas perhubungan angkutan umum, kepolisian UPPA di luar wilayah Kulon Progo. Selain itu, untuk menemukan tersangkanya pihak UPPA Polres Kulon Progo melakukan penyadapan melalui alat komunikasi yang digunakan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Untuk Polres Kulon Progo

- a. Hendaknya Polres Kulon Progo dalam mengadakan sosialisasi di sekolah (pribadi yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, dan berhati-hatilah menjaga diri) dan di masyarakat (pencegahan terjadinya pencabulan anak, waspada pencabulan anak, dan tingkatkan ketaqwaan, hindari maksiat) tidak hanya menunggu permintaan/undangan dari pihak sekolah maupun masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan terjadwal secara kontinue dan berkesinambungan.
- b. Hendaknya Polres Kulon Progo lebih disiplin tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Waspada Pencabulan Anak agar kepercayaan masyarakat akan peranan dan tugas polisi tetap terjaga.

2. Untuk Orang Tua

Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana pencabulan anak, orang tua perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada, dan tidak mudah tergiur bujuk rayu orang-orang yang baru dikenal

terutama melalui media sosial seperti *Twitter* atau *Facebook*. Orang tua korban ini maupun orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencabulan anak ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Bambang Poernomo. 1985. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Burhan Bungin. 2000. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Hadari Nawawi. 2000. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartini, Kartono. 1985. *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdakaryaOffset
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sadjijono. 2008. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Sanafiah Faisal. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tim Redaksi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Van Apeldoorn. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Internet

Koran Sindo. 2013. *Kasus Pencabulan Tinggi*. <http://koran-sindo.com/node/333958> diakses tanggal 14 januari 2014 pukul 22:00

Merdeka.com. 2013. *Ayah Setubuhi Anak Tiri Berusia 15 tahun Hingga Melahirkan*. <http://m.merdeka.com/peristiwa/ayah-setubuhi-anak-tiri-berusia-15-tahun-hingga-melahirkan.html> diakses tanggal 16 Desember 2013 pukul 22:47)

Solopos.com. 2012. *Astaga Mesum di Warnet Pelajar SMK Hamil 4 Bulan*. http://www.solopos.com/2012/10/30/astaga-mesum-di-warnet-pelajar-smk-hamil-4-bulan-343322?mobile_switch_mobile diakses tanggal 13 Januari 2014 pukul 10:20

Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013. *Pelecehan Seksual terhadap Anak*. http://id.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak diakses tanggal 05 Januari 2014 pukul 09:04

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.